

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK ILEGAL (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)

Oleh:

Adhiesty Ayu Ramadhani

Tindak pidana dibidang Cukai dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai rokok akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai rokok akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Permasalahan ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok dan apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah PPNS bidang Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat, Penyidik bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, Dosen bagian Pidana FH Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan pita cukai dalam tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu regulasi mengenai pemalsuan pita cukai dapat dikaitkan dengan Pasal 54 UU Cukai, Pasal 55 UU Cukai, Pasal 56 UU Cukai. Sedangkan pada tahap aplikasi aparat penegak hukum menerapkan dakwaan berbentuk alternatif pertama yakni Pasal 54 UU Cukai. Pada tahap eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp283.655.920. Faktor – faktor yang menghambat instansi Bea dan Cukai

Adhiesty Ayu Ramadhani

yaitu, pertama faktor masyarakat yang secara umum memiliki rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemalsuan pita cukai sehingga semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kedua, faktor kebudayaan yang dimana adanya budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup keuntungan materi yang signifikan.

Saran dari penulis hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai agar masyarakat memiliki pemahaman serta kesadaran hukum. Sebaiknya masyarakat khususnya pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pemalsuan pita cukai serta menghilangkan budaya keserakahan yang ada di dalam masyarakat. Hendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan pita cukai. Mengenai faktor yang memengaruhi penegakan hukum pemalsuan pita cukai ialah mungkin mulai saat ini dapat dipenuhi semua kekurangan dari faktor - faktor tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Cukai, Pemalsuan Pita Cukai

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL CIGARETTE EXCISE BONDS

*(Study at the Regional Office of the Directorate General
of Customs and Excise West Sumatra)*

By:

Adhiesty Ayu Ramadhani

Excise crimes in this case are those that are closely related to counterfeiting cigarette excise stamps will have an impact on two sides, namely affecting state revenues and undermining the social system. Criminal act in the field of excise, such as counterfeiting cigarette excise stamps, will have an impact, namely detrimental to state revenues. This problem is how to enforce the law crime against counterfeiting of cigarette excise stamps and what are the factors hinder the enforcement of criminal law against counterfeiting of cigarette excise stamps.

The problem approach in this study uses a normative juridical approach and empirical juridical approach. The data used is primary data, data secondary and tertiary data. The sources in this study are PPNS field of Enforcement and Investigation of the Directorate General of Customs and Excise Regional Office West Sumatra, Investigator under the Special Criminal Investigation Directorate Lampung Regional Police, Lecturer in the Criminal Section of FH Unila. While processing data obtained by means of data selection, data classification and data systematization. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that law enforcement against counterfeiting of excise stamps in money laundering crimes by using the theory of criminal law policy which consists of three stages. First, the formulation stage, namely regulations regarding counterfeit excise stamps can be linked with Article 54 of the Excise Law, Article 55 of the Excise Law, Article 56 of the Excise Law. Meanwhile on At the application stage, law enforcement officials apply alternative forms of indictment The first is Article 54 of the Excise Law. At the execution stage based on Decision No 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk sentenced the defendant to 1 year and 8 months in prison and a fine of IDR 283,655,920. Factors that hinder Customs and Excise agencies

Adhiesty Ayu Ramadhani

namely, the first is the community factor which in general has low knowledge and public awareness about counterfeiting excise stamps making it even more difficult implementing good law enforcement. Second, which cultural factors there is a culture of greed in society by reaping material benefits significant.

Suggestions from the author should the relevant agencies to jointly carry out good coordination in conducting socialization or counseling related to enforcement criminal law against the crime of counterfeiting excise stamps so that people have them legal understanding and awareness. It is better for the community, especially the perpetrators of the crime the criminal does not repeat the act of falsifying excise stamps and eliminating culture greed in society. It should be for the government improve the quality and supervision of the performance of apparatus in prevention crime of counterfeiting excise stamps. Regarding factors affecting enforcement the law for counterfeiting excise stamps is possible from now on all of them can be fulfilled lack of these factors.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Excise Crime, Ribbon Forgery Tax